



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI ZULKIFLI INDRAJAYA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **490852**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.369.850.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1479 m²/200 m² di KAB / KOTA BANTAENG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 221.850.000
2. Tanah Seluas 3780 m² di KAB / KOTA BANTAENG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 378.000.000
3. Tanah Seluas 91 m² di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 182 m² di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1700 m²/135 m² di KAB / KOTA BANTAENG, WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 2.300.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 6.070.825****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.378.220.825****III. HUTANG****Rp. 32.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.346.220.825**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.